

MELAMPAUI DIKOTOMI TUNDUK DAN MELAWAN: MODEL KESETIAAN DIALEKTIS DALAM SPIRITUALITAS KENABIAN GMT

Yuda Hawu Haba^{1*}, Mesakh A.P. Dethan², Welfrid Fini Ruku³

^{1,2,3} Teologi Agama Kristen, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

*Corresponding author: yudahawuhaba@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika ketundukan dan perlawanan dalam spiritualitas kenabian Gereja Masehi Injili di Timor (GMT) dalam relasi gereja dan negara sejak tahun 1947 hingga konteks kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain teologis-historis melalui analisis dokumen gereja, literatur teologi publik, dan kajian sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMT tidak berada dalam posisi tunduk atau melawan secara absolut, tetapi berkembang melalui dialektika antara ketundukan strategis dan perlawanan profetik. Penelitian ini merumuskan Model Segitiga Profetik GMT yang terdiri atas *discernment* teologis, ketundukan strategis, dan perlawanan profetik sebagai kerangka memahami peran gereja lokal dalam ruang publik. Model ini menunjukkan bahwa gereja dapat membangun relasi konstruktif dengan negara sekaligus mempertahankan fungsi kritis terhadap ketidakadilan sosial.

Kata Kunci: GMT, Spiritualitas Kenabian, Teologi Publik, Relasi Gereja-Negara, Perlawanan Profetik.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of obedience and resistance within the prophetic spirituality of the Evangelical Christian Church in Timor (GMT) in relation to the state from 1947 to the contemporary period. This study employed a qualitative approach with a theological-historical design through the analysis of church documents, public theology literature, and socio-political studies. The findings reveal that GMT's prophetic spirituality cannot be understood as absolute submission or resistance, but rather as a dialectical process between strategic obedience and prophetic resistance. This study formulates the GMT Prophetic Triangle Model consisting of theological discernment, strategic obedience, and prophetic resistance as a framework for understanding the role of local churches in the public sphere. The model demonstrates that churches can establish constructive relationships with the state while maintaining their critical role in responding to social injustice.

Keywords: GMT, Prophetic Spirituality, Public Theology, Church-State Relations, Prophetic Resistance.

1. PENDAHULUAN

Relasi antara gereja dan negara merupakan salah satu isu penting dalam kajian teologi politik kontemporer karena menyangkut bagaimana komunitas iman menjalankan peran publik tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Gereja tidak hanya hadir sebagai institusi keagamaan yang berorientasi pada pelayanan internal, tetapi juga sebagai komunitas moral yang berhadapan dengan realitas sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Dalam konteks masyarakat modern, keterlibatan gereja dalam ruang publik menghadirkan ketegangan antara kebutuhan untuk menghormati otoritas negara dan panggilan profetik untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, serta keberpihakan kepada kelompok rentan (Volf & Croasmun, 2019). Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa relasi gereja dan negara tidak dapat dipahami melalui dikotomi sederhana antara kepatuhan atau penolakan, tetapi membutuhkan proses refleksi teologis yang kontekstual.

Dalam perspektif teologi publik, gereja dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupan

sosial bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai komunitas yang menghadirkan nilai-nilai transformatif bagi masyarakat. Kehadiran gereja dalam ruang publik harus mempertahankan keseimbangan antara keterlibatan konstruktif dan kritik profetik terhadap struktur sosial yang menghasilkan ketidakadilan. Schliesser (2023) menjelaskan bahwa teologi publik Kristen perlu melampaui pendekatan biner antara akomodasi dan oposisi terhadap kekuasaan, karena gereja sering kali berada dalam posisi yang kompleks: mendukung kebaikan bersama ketika negara menjalankan fungsi sosialnya, tetapi juga memberikan kritik ketika kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan dan martabat manusia.

Dalam sejarah Kekristenan, ketundukan terhadap otoritas politik tidak pernah dipahami sebagai kepatuhan absolut tanpa batas. Sebaliknya, tradisi Kristen menunjukkan adanya ruang dialektis antara penghormatan terhadap keteraturan sosial dan keberanian untuk menolak ketidakadilan. Konsep ini semakin relevan dalam konteks gereja-gereja lokal yang hidup dalam dinamika sosial-politik tertentu. Gereja dituntut untuk melakukan *discernment* teologis, yaitu kemampuan membaca tanda-tanda zaman dan merespons perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai iman, bukan sekadar berdasarkan kepentingan institusional atau tekanan politik (VanDrunen, 2020).

Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa relasi gereja dan negara memiliki sejarah yang kompleks. Gereja-gereja di Indonesia mengalami berbagai fase perubahan politik, mulai dari masa kolonialisme, pembentukan negara bangsa, pemerintahan Orde Baru, hingga era demokrasi pasca-Reformasi. Dalam setiap periode tersebut, gereja menghadapi tantangan untuk menjaga identitas spiritual sekaligus menentukan posisi sosial-politiknya. Tekanan politik, kebutuhan mempertahankan keberlangsungan institusi, dan tuntutan untuk menyuarakan keadilan sering kali menghasilkan bentuk-bentuk respons yang beragam, mulai dari adaptasi strategis hingga kritik profetik terhadap kekuasaan (Hof, 2020).

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) merupakan salah satu contoh konkret gereja lokal yang mengalami dinamika tersebut. Sejak berdiri pada tahun 1947, GMIT berkembang dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik tersendiri. Sebagai gereja yang tumbuh dalam lingkungan pascakolonial, GMIT tidak hanya menghadapi tantangan internal kelembagaan, tetapi juga berbagai persoalan publik seperti kemiskinan, perdagangan manusia, konflik sosial, korupsi, dan krisis ekologis. Kondisi tersebut menuntut gereja untuk mengembangkan spiritualitas kenabian yang tidak berhenti pada dimensi ritual, tetapi diwujudkan melalui keterlibatan sosial yang nyata (Kleden, 2019).

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, panggilan profetik gereja menjadi semakin penting karena berbagai persoalan struktural masih memengaruhi kehidupan masyarakat. Praktik perdagangan manusia, misalnya, menunjukkan adanya kerentanan sosial yang membutuhkan respons multidimensional, termasuk keterlibatan institusi keagamaan dalam pendidikan, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime menunjukkan bahwa kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta kerentanan ekonomi menjadi faktor yang memperbesar risiko eksploitasi manusia di berbagai wilayah, termasuk kawasan Asia Tenggara (Crime, 2020). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan suara kenabian bagi mereka yang mengalami ketidakadilan.

Selain persoalan sosial, krisis ekologis juga menjadi tantangan penting bagi gereja kontemporer. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik pemanfaatan ruang menuntut gereja untuk mengembangkan refleksi teologis mengenai hubungan manusia, alam, dan tanggung jawab iman. Teologi ekologis kontemporer menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan bagian integral dari panggilan iman untuk merawat ciptaan (Deane-Drummond & Artinian-Kaiser, 2018). Dengan demikian, spiritualitas kenabian gereja perlu mencakup dimensi sosial, ekologis, dan kemanusiaan secara holistik.

Meskipun demikian, kajian mengenai peran profetik gereja lokal masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam menjelaskan bagaimana gereja menegosiasikan ketegangan antara ketundukan dan perlawanan dalam konteks historis tertentu. Banyak kajian teologi politik cenderung melihat gereja melalui dua kutub ekstrem: gereja yang terlalu dekat dengan negara sehingga kehilangan daya kritisnya, atau gereja yang mengambil posisi oposisi permanen terhadap kekuasaan. Padahal, pengalaman gereja lokal menunjukkan adanya praktik yang lebih kompleks, yaitu strategi adaptasi, kritik moral, dan keterlibatan sosial yang berlangsung secara simultan (Schliesser, 2023).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika ketundukan dan perlawanan dalam spiritualitas kenabian GMIT sejak berdiri hingga konteks kontemporer. Penelitian ini berargumen bahwa spiritualitas kenabian GMIT tidak dapat direduksi sebagai sikap tunduk atau melawan secara sederhana, tetapi merupakan proses dialektis yang terus berkembang melalui refleksi iman, pengalaman sejarah, dan respons terhadap perubahan sosial-politik. Artikel ini menawarkan kontribusi konseptual melalui formulasi Model Segitiga Profetik yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu *discernment* teologis, ketundukan strategis, dan perlawanan profetik sebagai kerangka memahami relasi gereja dan negara dalam konteks Indonesia Timur.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain teologis-historis untuk menganalisis dinamika ketundukan dan perlawanan dalam spiritualitas kenabian Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sejak berdiri tahun 1947 hingga konteks kontemporer. Pendekatan teologis-historis dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peristiwa sejarah, tetapi juga menginterpretasikan makna teologis yang muncul dari pengalaman gereja dalam berhadapan dengan struktur kekuasaan, perubahan sosial-politik, dan persoalan publik. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara refleksi normatif-teologi, kajian sejarah gereja, serta analisis konteks sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen historis dan arsip gereja, khususnya dokumen Sinode GMIT, risalah persidangan sinode, serta dokumen kelembagaan yang merekam perkembangan sikap dan respons GMIT terhadap dinamika sosial-politik. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh melalui kajian literatur teologi politik, teologi publik, spiritualitas kenabian, serta berbagai laporan institusi terkait isu sosial seperti perdagangan manusia, korupsi, dan krisis ekologis.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, analisis normatif-teologis, yaitu mengkaji teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan relasi gereja dan kekuasaan, khususnya konsep ketundukan, ketaatan kepada Allah, dan panggilan profetik gereja. Kedua, analisis historis, yaitu menelusuri perkembangan spiritualitas kenabian GMIT berdasarkan periodisasi sejarah sejak 1947 hingga masa kini. Ketiga, dialog kritis teologis, yaitu membandingkan temuan historis GMIT dengan perspektif teologi politik dan teologi publik kontemporer. Keempat, analisis kontekstual, yaitu menghubungkan refleksi teologis dengan persoalan aktual masyarakat Nusa Tenggara Timur seperti kemiskinan, perdagangan manusia, korupsi, dan persoalan ekologis. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data arsip gereja, literatur akademik, dan laporan institusi terkait. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman mengenai spiritualitas kenabian GMIT sebagai praktik iman yang bersifat dialektis, yaitu berada dalam ketegangan kreatif antara ketundukan strategis dan perlawanan profetik, serta merumuskan Model Segitiga Profetik sebagai kerangka konseptual relasi gereja dan negara dalam konteks Indonesia Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Ketundukan GMIT terhadap Kekuasaan Negara: Antara Kepatuhan Institusional dan Strategi Bertahan

Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi GMIT dengan negara sejak berdirinya pada tahun 1947 memperlihatkan pola hubungan yang dinamis antara ketundukan institusional dan upaya mempertahankan identitas profetik gereja. Dalam perjalanan sejarahnya, GMIT tidak selalu mengambil posisi konfrontatif terhadap kekuasaan politik, melainkan sering melakukan negosiasi strategis dengan negara untuk mempertahankan keberlangsungan pelayanan gereja dan stabilitas komunitas iman. Pola tersebut menunjukkan bahwa ketundukan gereja terhadap negara tidak selalu dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap kekuasaan, tetapi dapat menjadi strategi sosial-politik dalam konteks tertentu.

Dalam perspektif teologi politik, hubungan gereja dan negara memang memiliki kompleksitas karena gereja hidup dalam realitas sosial yang sama dengan struktur politik yang mengatur masyarakat. Gereja membutuhkan ruang sosial yang memungkinkan pelayanan berlangsung, sementara negara membutuhkan partisipasi masyarakat sipil dalam membangun kehidupan bersama. Namun, hubungan tersebut menjadi problematis ketika gereja kehilangan kemampuan kritis terhadap kekuasaan. Volf & Croasmun (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan gereja dalam kehidupan publik harus tetap mempertahankan dimensi kritisnya agar gereja tidak berubah menjadi instrumen legitimasi politik.

Dalam konteks GMIT, sikap ketundukan terhadap negara dapat dipahami sebagai bentuk *strategic accommodation*, yaitu kemampuan gereja menyesuaikan diri dengan kondisi politik tanpa sepenuhnya kehilangan nilai teologisnya. Sikap ini terlihat terutama pada periode awal pembentukan gereja pascakolonial ketika stabilitas sosial-politik menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan institusi gereja. Adaptasi terhadap struktur negara pada masa tersebut menjadi bagian dari proses konsolidasi kelembagaan dan pembentukan identitas gereja lokal dalam negara Indonesia yang baru terbentuk.

Namun demikian, ketundukan tersebut tidak berarti bahwa GMIT kehilangan dimensi profetiknya. Sejarah gereja menunjukkan bahwa komunitas Kristen sering berada dalam posisi ambivalen terhadap negara: di satu sisi mengakui pentingnya otoritas pemerintahan untuk menjaga keteraturan sosial, tetapi di sisi lain memiliki kewajiban moral untuk memberikan kritik ketika terjadi penyimpangan kekuasaan. Schliesser (2023) menegaskan bahwa teologi publik Kristen harus mampu menjaga keseimbangan antara partisipasi konstruktif dalam kehidupan politik dan keberanian melakukan kritik moral terhadap struktur yang menghasilkan ketidakadilan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketundukan GMIT lebih tepat dipahami sebagai bentuk ketundukan kontekstual, yaitu respons gereja terhadap situasi sosial-politik tertentu berdasarkan pertimbangan pastoral dan teologis. Dalam kondisi ketika negara menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial, gereja dapat memberikan dukungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Sebaliknya, ketika negara menghadirkan praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, martabat manusia, dan kepentingan kelompok rentan, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kenabiannya.

Perspektif ini sejalan dengan konsep *public theology* yang memandang gereja bukan sebagai institusi yang terisolasi dari masyarakat, melainkan sebagai komunitas moral yang berkontribusi terhadap kehidupan bersama. Teologi publik menolak pemisahan mutlak antara iman dan ruang publik karena persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak manusia merupakan bagian dari tanggung jawab moral komunitas iman (Kim & Day, 2017). Dengan demikian, ketundukan GMIT terhadap negara perlu dipahami dalam kerangka partisipasi sosial yang tetap memiliki batas normatif berdasarkan nilai-nilai Injil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa ketundukan GMT terhadap negara merupakan bentuk respons adaptif yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan kebutuhan sosial gereja. Ketundukan tersebut bukan merupakan tanda hilangnya suara profetik, tetapi bagian dari strategi gereja dalam mempertahankan eksistensi dan menjalankan pelayanan di tengah struktur kekuasaan. Dengan demikian, spiritualitas kenabian GMT sejak awal telah menunjukkan karakter dialektis antara menerima keberadaan negara dan mempertahankan kebebasan moral gereja.

Perlawanan Profetik GMT terhadap Ketidakadilan Sosial dan Politik: Dari Kritik Moral hingga Advokasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMT tidak hanya diwujudkan melalui kemampuan beradaptasi dengan struktur kekuasaan, tetapi juga melalui keberanian melakukan kritik dan perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial-politik. Perlawanan dalam konteks GMT tidak selalu berbentuk oposisi langsung terhadap negara, melainkan diwujudkan melalui tindakan profetik berupa penyampaian suara moral gereja, pendampingan kelompok rentan, advokasi sosial, serta keterlibatan dalam penyelesaian persoalan publik. Dengan demikian, fungsi kenabian gereja dipahami sebagai panggilan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam realitas sosial yang mengalami ketimpangan.

Dalam perspektif teologi publik, gereja memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kesaksian iman dalam ruang publik melalui keberpihakan terhadap keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. Gereja tidak hanya bertugas mengelola kehidupan spiritual jemaat, tetapi juga dipanggil untuk membaca realitas sosial dan memberikan respons terhadap berbagai bentuk penderitaan manusia. Kim & Day (2017) menjelaskan bahwa teologi publik menempatkan komunitas agama sebagai aktor sosial yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan kehidupan bersama melalui refleksi moral dan keterlibatan sosial. Dalam kerangka tersebut, tindakan profetik gereja bukanlah aktivitas politik praktis, melainkan ekspresi iman yang diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam konteks GMT, bentuk perlawanan profetik dapat dilihat melalui respons gereja terhadap persoalan kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, perdagangan manusia, serta berbagai bentuk marginalisasi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa gereja tidak dapat membatasi pelayanan hanya pada dimensi spiritual individual, karena penderitaan manusia sering kali berkaitan dengan struktur sosial yang tidak adil. Gereja dipanggil untuk menghadirkan pelayanan yang bersifat transformatif dengan memperhatikan akar persoalan sosial, bukan hanya memberikan bantuan karitatif sesaat.

Salah satu aspek penting dalam spiritualitas kenabian GMT adalah keberpihakan terhadap kelompok yang mengalami kerentanan sosial. Dalam konteks perdagangan manusia, misalnya, gereja memiliki posisi strategis karena memiliki jaringan komunitas hingga tingkat lokal yang dapat berperan dalam pencegahan, edukasi, pendampingan korban, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran bahwa organisasi keagamaan dapat menjadi kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) yang berkontribusi dalam menghadapi persoalan struktural melalui jaringan sosial, nilai moral, dan kapasitas komunitas (Furness & Gilligan, 2018).

Perlawanan profetik GMT juga dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan kekuasaan yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Tradisi kenabian dalam Kekristenan tidak hanya berbicara mengenai keberanian menyampaikan kebenaran, tetapi juga kemampuan gereja untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang bertentangan dengan keadilan Allah. Dalam hal ini, gereja tidak menolak keberadaan negara, tetapi memberikan kritik ketika kebijakan atau tindakan politik menghasilkan penderitaan bagi masyarakat. Peran kritik moral tersebut menjadi salah satu fungsi penting agama dalam demokrasi karena agama dapat menjadi sumber nilai etis yang mengingatkan kekuasaan agar tetap berorientasi pada kepentingan publik (Snyder, 2020).

Namun demikian, perlawanan profetik GMIT tidak dapat dipahami sebagai gerakan politik oposisi yang memisahkan gereja dari negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter perlawanan GMIT lebih bersifat konstruktif dan dialogis. Gereja berusaha menghadirkan koreksi moral terhadap kekuasaan sambil tetap membangun kerja sama untuk kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kritik dan kolaborasi, yaitu gereja menolak ketidakadilan tetapi tetap membuka ruang kerja sama dengan pemerintah dalam penyelesaian persoalan sosial.

Selain persoalan sosial-politik, dimensi profetik GMIT juga berkembang dalam isu ekologis. Krisis lingkungan menjadi salah satu ruang baru bagi gereja untuk menjalankan panggilan kenabiannya karena kerusakan ekologis sering kali berkaitan dengan ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Teologi ekologis kontemporer menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan ciptaan dan mengkritisi praktik pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis (Deane-Drummond & Artinian-Kaiser, 2018).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan profetik GMIT merupakan bentuk aktualisasi iman yang berorientasi pada transformasi sosial. Perlawanan tersebut tidak dilakukan melalui penolakan terhadap negara secara mutlak, tetapi melalui keberanian gereja menyuarakan kebenaran, mendampingi kelompok rentan, dan memperjuangkan kehidupan yang lebih adil. Pola ini menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMIT memiliki karakter dialogis, yaitu mampu berdiri bersama masyarakat sekaligus menjaga hubungan kritis terhadap struktur kekuasaan.

Dialektika Ketundukan dan Perlawanan: Formulasi Spiritualitas Kenabian GMIT dalam Relasi Gereja dan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMIT tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai sikap yang sepenuhnya tunduk terhadap negara atau sepenuhnya melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Sebaliknya, pengalaman historis GMIT memperlihatkan adanya dialektika antara ketundukan strategis dan perlawanan profetik yang berjalan secara bersamaan sesuai dengan konteks sosial-politik yang dihadapi gereja. Ketundukan muncul ketika gereja mengakui fungsi negara dalam menjaga keteraturan sosial dan menciptakan ruang kehidupan bersama, sedangkan perlawanan muncul ketika gereja menjalankan tanggung jawab moral untuk mengkritisi praktik kekuasaan yang bertentangan dengan nilai keadilan, perdamaian, dan martabat manusia.

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi gereja dan negara dalam konteks GMIT lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat dinamis dan negosiatif. Gereja tidak berada di luar struktur sosial-politik, tetapi hidup dalam realitas yang sama dengan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, respons gereja terhadap kekuasaan selalu dipengaruhi oleh kondisi historis, kebutuhan pastoral, dan pertimbangan teologis. Dalam perspektif teologi politik kontemporer, gereja memiliki tanggung jawab ganda, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan publik sekaligus mempertahankan kebebasan moral untuk memberikan evaluasi kritis terhadap kekuasaan (Cavanaugh, 2017).

Ketundukan strategis dalam spiritualitas GMIT menunjukkan bahwa gereja memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi tanpa kehilangan identitas profetiknya. Sikap menerima keberadaan negara bukan berarti gereja menyerahkan seluruh otoritas moralnya kepada kekuasaan politik. Sebaliknya, ketundukan tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa negara memiliki fungsi sosial tertentu dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial, selama kerja sama tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai Injil.

Namun, ketundukan strategis tersebut memiliki batas teologis. Ketika negara atau struktur kekuasaan menghasilkan ketidakadilan, diskriminasi, atau mengabaikan kelompok

rentan, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kenabiannya. Dalam tradisi kenabian Kristen, kritik terhadap kekuasaan bukanlah bentuk penolakan terhadap negara, melainkan ekspresi kesetiaan kepada Allah dan nilai-nilai Kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki batas moral karena tidak dapat ditempatkan di atas nilai kebenaran dan keadilan (Hunsinger, 2017).

Dalam konteks GMIT, perlawanan profetik tidak diwujudkan melalui tindakan politik praktis, tetapi melalui berbagai bentuk kesaksian sosial. Gereja menghadirkan kritik melalui suara moral, pelayanan kepada masyarakat miskin, advokasi terhadap kelompok rentan, serta keterlibatan dalam isu-isu publik seperti perdagangan manusia dan krisis ekologis. Pola ini menunjukkan bahwa perlawanan profetik memiliki karakter konstruktif, yaitu bukan sekadar menolak kekuasaan, tetapi berupaya mengarahkan kekuasaan agar lebih berpihak pada kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Dialektika antara ketundukan dan perlawanan tersebut dapat dipahami melalui konsep gereja sebagai komunitas saksi publik (*public witness community*). Gereja dipanggil untuk hadir dalam dunia, tetapi tidak sepenuhnya larut dalam logika dunia. Volf & Croasmun (2019) menjelaskan bahwa gereja yang berorientasi pada kehidupan dunia harus mampu menghadirkan nilai iman dalam realitas sosial tanpa kehilangan kemampuan kritis terhadap struktur yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, keterlibatan sosial gereja bukan sekadar aktivitas tambahan, tetapi bagian integral dari identitas dan misi gereja.

Berdasarkan hasil analisis, spiritualitas kenabian GMIT dapat dirumuskan melalui tiga dimensi utama. Pertama, *discernment* teologis, yaitu kemampuan gereja membaca realitas sosial-politik berdasarkan nilai iman dan konteks masyarakat. Kedua, ketundukan strategis, yaitu sikap menerima dan bekerja sama dengan negara dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Ketiga, perlawanan profetik, yaitu keberanian gereja menyuarakan kritik moral terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga dimensi tersebut membentuk pola relasi gereja-negara yang tidak bersifat antagonistik, tetapi dialogis dan transformatif. Model tersebut menunjukkan bahwa kekuatan profetik gereja tidak terletak pada posisi politik tertentu, melainkan pada kemampuan mempertahankan integritas moral dalam berbagai situasi kekuasaan.

Gereja yang hanya tunduk tanpa kritik berisiko kehilangan fungsi kenabiannya, sementara gereja yang hanya melakukan perlawanan tanpa dialog berisiko kehilangan kemampuan transformatifnya. Oleh karena itu, spiritualitas kenabian GMIT membutuhkan keseimbangan antara keterlibatan dan kritik, antara kerja sama dan koreksi, serta antara penerimaan terhadap negara dan kesetiaan kepada nilai-nilai Kerajaan Allah. Perspektif ini sejalan dengan kajian agama dalam ruang publik yang menegaskan bahwa komunitas keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial melalui keterlibatan kritis, pembentukan nilai moral bersama, dan kemampuan memberikan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil (Gao, 2017; Gustafson, 2019).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa spiritualitas kenabian GMIT merupakan bentuk praktik iman yang bersifat kontekstual dan dialektis. Ketundukan dan perlawanan bukan dua sikap yang saling bertentangan, tetapi dua ekspresi iman yang muncul dalam situasi berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menjadi dasar bagi formulasi Model Segitiga Profetik GMIT yang mengintegrasikan dimensi teologis, sosial, dan politik dalam memahami peran gereja lokal di tengah perubahan zaman.

Relevansi Spiritualitas Kenabian GMIT dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMIT tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat NTT memperlihatkan bahwa

gereja tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal kelembagaan, tetapi juga dengan berbagai persoalan publik seperti kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, perdagangan manusia, dan krisis ekologis. Dalam konteks tersebut, spiritualitas kenabian tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan gereja menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai panggilan untuk menghadirkan transformasi sosial melalui pelayanan yang berpihak kepada kehidupan manusia dan keberlanjutan ciptaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat NTT adalah persoalan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Kondisi kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, infrastruktur, dan distribusi sumber daya yang belum merata. Dalam konteks ini, spiritualitas kenabian GMT mendorong gereja untuk bergerak melampaui pelayanan karitatif menuju pelayanan transformatif. Gereja tidak hanya dipanggil untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, tetapi juga membaca akar persoalan yang menyebabkan kerentanan sosial tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan teologi publik yang menempatkan gereja sebagai komunitas yang berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan bersama melalui tindakan nyata bagi keadilan sosial (Kim & Day, 2017).

Relevansi spiritualitas kenabian GMT juga terlihat dalam respons terhadap persoalan perdagangan manusia yang menjadi salah satu bentuk ketidakadilan sosial di NTT. Fenomena perdagangan manusia menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan, rendahnya akses informasi, kerentanan ekonomi, dan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam situasi tersebut, gereja memiliki posisi strategis karena memiliki jaringan komunitas yang luas hingga tingkat lokal. Gereja dapat berperan melalui pendidikan kesadaran kritis, pendampingan korban, penguatan keluarga, serta kerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan pemerintah. Peran tersebut menunjukkan bahwa fungsi kenabian gereja tidak hanya berupa penyampaian pesan moral, tetapi juga diwujudkan melalui keberpihakan konkret terhadap kelompok yang mengalami penindasan (Furness & Gilligan, 2018).

Selain persoalan sosial, spiritualitas kenabian GMT juga memiliki relevansi dalam menghadapi krisis ekologis. NTT merupakan wilayah yang memiliki kerentanan ekologis akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, kekeringan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Dalam perspektif teologi ekologis, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan moral dan spiritual karena berkaitan dengan hubungan manusia dengan ciptaan. Oleh sebab itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran ekologis melalui pendidikan iman, advokasi lingkungan, dan praktik pelayanan yang mendukung keberlanjutan alam. Teologi ekologis kontemporer menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari tanggung jawab iman Kristen terhadap ciptaan Allah (Deane-Drummond & Artinian-Kaiser, 2018).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, spiritualitas kenabian GMT menunjukkan bahwa gereja perlu mempertahankan keseimbangan antara identitas spiritual dan keterlibatan sosial. Gereja tidak dapat menarik diri dari persoalan masyarakat dengan alasan bahwa politik dan sosial berada di luar wilayah pelayanan gereja, karena iman Kristen memiliki dimensi publik yang menuntut keterlibatan terhadap realitas kehidupan manusia. Pengalaman historis GMT memperlihatkan bahwa kehidupan iman selalu berinteraksi dengan konteks sosial tempat gereja hadir, sehingga keberanian gereja terlibat dalam persoalan publik merupakan bentuk kesaksian iman yang menghadirkan nilai Injil dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *public theology* yang menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama melalui refleksi iman, dialog sosial, dan tindakan transformatif bagi keadilan masyarakat (Serrán-Pagán y Fuentes, 2021).

Namun demikian, keterlibatan gereja dalam persoalan publik juga membutuhkan kebijaksanaan teologis agar gereja tidak kehilangan identitas spiritualnya. Gereja bukan

lembaga politik alternatif yang menggantikan fungsi negara, tetapi komunitas iman yang memberikan kontribusi moral dan sosial bagi kehidupan bersama. Karena itu, model keterlibatan yang sesuai bagi GMIT adalah keterlibatan kritis-konstruktif, yaitu bekerja sama dengan negara dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik, tetapi tetap mempertahankan kemampuan profetik untuk memberikan kritik terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan (Schliesser, 2023).

Berdasarkan hasil analisis, spiritualitas kenabian GMIT memiliki relevansi bukan hanya sebagai warisan sejarah gereja, tetapi sebagai paradigma pelayanan yang terus berkembang dalam menghadapi perubahan zaman. Ketundukan strategis memungkinkan gereja membangun kerja sama sosial dengan berbagai pihak, sedangkan perlawanan profetik memungkinkan gereja mempertahankan fungsi moralnya ketika menghadapi ketidakadilan. Kombinasi keduanya menghasilkan bentuk pelayanan gereja yang adaptif, kritis, dan transformatif dalam konteks NTT.

Dengan demikian, spiritualitas kenabian GMIT dapat dipahami sebagai kekuatan moral yang mampu menjembatani antara iman dan realitas sosial. Gereja tidak hanya menjadi ruang pembinaan spiritual jemaat, tetapi juga menjadi komunitas yang hadir untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Relevansi inilah yang menjadikan pengalaman GMIT penting untuk dikaji sebagai model gereja lokal yang mampu mempertahankan identitas iman sekaligus menjalankan tanggung jawab publik di tengah kompleksitas perubahan sosial.

Model Segitiga Profetik GMIT: Integrasi *Discernment* Teologis, Ketundukan Strategis, dan Perlawanan Profetik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika historis GMIT dalam relasinya dengan negara tidak dapat dijelaskan hanya melalui konsep kepatuhan atau konflik. Pengalaman GMIT sejak berdiri hingga konteks kontemporer memperlihatkan adanya pola relasi yang lebih kompleks, yaitu kemampuan gereja untuk melakukan pembacaan konteks, membangun kerja sama dengan negara, sekaligus mempertahankan fungsi kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Segitiga Profetik GMIT sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana spiritualitas kenabian gereja lokal bekerja dalam ruang publik.

Model Segitiga Profetik GMIT dibangun atas tiga elemen utama yang saling berhubungan, yaitu (1) *discernment* teologis, (2) ketundukan strategis, dan (3) perlawanan profetik. Ketiga elemen tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk suatu dinamika yang memungkinkan gereja merespons perubahan sosial-politik secara kontekstual. *Discernment* teologis menjadi dasar interpretasi gereja dalam membaca realitas, ketundukan strategis menjadi bentuk keterlibatan konstruktif dengan negara, sedangkan perlawanan profetik menjadi mekanisme koreksi moral ketika kekuasaan menghasilkan ketidakadilan.

Komponen pertama, yaitu *discernment* teologis, merupakan kemampuan gereja untuk membaca dan menafsirkan realitas sosial berdasarkan perspektif iman. Dalam konteks GMIT, *discernment* tidak hanya berkaitan dengan refleksi internal gereja, tetapi juga mencakup kemampuan memahami persoalan masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perdagangan manusia, dan krisis ekologis. Proses ini menjadi penting karena respons gereja terhadap negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan gereja membedakan antara bentuk kekuasaan yang mendukung kehidupan bersama dan bentuk kekuasaan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Dalam teologi publik, kemampuan membaca konteks sosial merupakan bagian penting dari kesaksian gereja di ruang publik karena iman selalu memiliki konsekuensi sosial (Kim & Day, 2017).

Komponen kedua adalah ketundukan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketundukan GMIT terhadap negara bukanlah bentuk kepatuhan tanpa batas, melainkan strategi keterlibatan dalam kehidupan sosial-politik. Ketundukan strategis memungkinkan gereja

bekerja sama dengan negara dalam bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan sosial, dan pembangunan komunitas. Dalam perspektif ini, negara tidak selalu dipandang sebagai pihak yang harus dilawan, tetapi sebagai mitra yang dapat diajak bekerja sama selama menjalankan fungsi pelayanan publik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa gereja memiliki kemampuan untuk hadir secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat tanpa kehilangan identitas teologisnya (Volf & Croasmun, 2019).

Namun, ketundukan strategis memiliki batas moral dan teologis. Ketika negara atau struktur kekuasaan menghasilkan praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, gereja dipanggil untuk menjalankan fungsi profetiknya. Oleh karena itu, elemen ketiga dalam Model Segitiga Profetik adalah perlawanan profetik. Perlawanan profetik tidak dipahami sebagai oposisi politik terhadap negara, tetapi sebagai tindakan moral untuk mengingatkan kekuasaan agar tetap berpihak pada keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan manusia. Dalam tradisi kenabian Kristen, kritik terhadap kekuasaan merupakan bentuk kesetiaan terhadap kehendak Allah ketika kekuasaan gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Schliesser, 2023).

Hubungan antara ketiga elemen tersebut bersifat dinamis. *Discernment* teologis menjadi pusat orientasi yang menentukan kapan gereja perlu bekerja sama dengan negara dan kapan gereja perlu memberikan kritik. Ketundukan strategis dan perlawanan profetik bukan dua sikap yang saling bertentangan, tetapi dua bentuk respons yang muncul berdasarkan hasil pembacaan gereja terhadap konteks tertentu. Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian GMT memiliki karakter dialektis, yaitu kemampuan untuk menerima, berdialog, dan bekerja sama dengan kekuasaan sekaligus mempertahankan kebebasan moral untuk melakukan kritik. Secara konseptual, Model Segitiga Profetik GMT dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Ilustrasi Model Segitiga Profetik GMT

Gambar tersebut menunjukkan bahwa *discernment* teologis menjadi fondasi utama yang menghubungkan dua respons gereja terhadap negara. Ketundukan strategis muncul ketika gereja menemukan ruang kerja sama yang mendukung kebaikan bersama, sedangkan perlawanan profetik muncul ketika gereja menemukan adanya penyimpangan kekuasaan atau ketidakadilan sosial. Dengan demikian, spiritualitas kenabian GMT tidak bergerak dalam pola biner antara menerima atau menolak negara, tetapi melalui proses reflektif yang mempertimbangkan konteks dan nilai iman.

Model ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian gereja dan negara, khususnya dalam konteks gereja lokal di masyarakat pascakolonial. Banyak kajian mengenai hubungan agama dan politik cenderung menempatkan gereja dalam dua posisi ekstrem, yaitu sebagai pendukung negara atau sebagai oposisi negara. Model Segitiga Profetik GMT menawarkan

perspektif alternatif bahwa gereja dapat menjalankan peran publik melalui kombinasi keterlibatan dan kritik. Perspektif ini relevan bagi gereja-gereja lokal di berbagai konteks karena menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian bukan sekadar keberanian menentang kekuasaan, tetapi juga kebijaksanaan dalam membangun relasi sosial yang transformatif. Pendekatan tersebut sejalan dengan kajian mengenai agama dalam ruang publik yang menegaskan bahwa komunitas keagamaan memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan pembentukan nilai bersama melalui keterlibatan kritis dalam masyarakat (Glazier, 2018).

Dengan demikian, Model Segitiga Profetik GMT menegaskan bahwa identitas kenabian gereja tidak ditentukan oleh jarak atau kedekatan gereja dengan negara, tetapi oleh kemampuan gereja mempertahankan integritas moral dalam setiap situasi kekuasaan. Gereja yang profetik adalah gereja yang mampu hadir bersama masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kebaikan bersama, sekaligus berani menyuarakan kebenaran ketika terjadi ketidakadilan. Model ini menjadi sintesis akhir penelitian bahwa spiritualitas kenabian GMT merupakan praktik iman yang bergerak dalam ruang dialektis antara membimbing, bekerja sama, dan mengoreksi kekuasaan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas kenabian Gereja Masehi Injili di Timor (GMT) dalam relasinya dengan negara tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketundukan atau perlawanan semata. Berdasarkan kajian teologis-historis, ditemukan bahwa GMT menjalankan pola relasi yang bersifat dialektis melalui perpaduan antara ketundukan strategis dan perlawanan profetik. Ketundukan strategis diwujudkan melalui kemampuan gereja membangun kerja sama dengan negara dalam berbagai aspek yang mendukung kehidupan bersama, sedangkan perlawanan profetik diwujudkan melalui keberanian gereja menyuarakan kritik moral terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial, politik, dan ekologis.

Hasil penelitian menegaskan bahwa spiritualitas kenabian GMT berakar pada kemampuan gereja melakukan *discernment* teologis dalam membaca konteks sosial-politik. Melalui proses tersebut, gereja mampu menentukan kapan harus bekerja sama dengan kekuasaan dan kapan harus menjalankan fungsi korektif terhadap kekuasaan. Dengan demikian, keterlibatan GMT dalam ruang publik bukanlah bentuk politisasi agama, melainkan ekspresi iman yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan Model Segitiga Profetik GMT yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu *discernment* teologis, ketundukan strategis, dan perlawanan profetik. Model ini menunjukkan bahwa gereja lokal dapat mempertahankan identitas spiritualnya sekaligus menjalankan peran transformatif dalam kehidupan publik. Spiritualitas kenabian tidak hanya berkaitan dengan keberanian menentang ketidakadilan, tetapi juga kemampuan membangun dialog, kerja sama, dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pengalaman GMT memberikan kontribusi konseptual bagi kajian hubungan gereja dan negara dalam konteks Indonesia Timur. Gereja yang profetik bukanlah gereja yang selalu berjarak dari kekuasaan maupun gereja yang sepenuhnya mengikuti kekuasaan, tetapi gereja yang mampu menghadirkan suara moral, memperjuangkan keadilan, dan menjaga keseimbangan antara keterlibatan sosial serta integritas iman. Model ini dapat menjadi kerangka reflektif bagi gereja-gereja lokal dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-politik kontemporer.

5. DAFTAR RUJUKAN

Cavanaugh, W. T. (2017). *The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict*. Oxford University Press.

- Crime, U. N. O. on D. and. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations.
- Deane-Drummond, C., & Artinian-Kaiser, R. (2018). *Theology and Ecology Across the Disciplines: On Care for Our Common Home*. Bloomsbury Academic.
- Furness, J., & Gilligan, P. (2018). Social work, religion and spirituality: Developing an evidence-based approach. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 37(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/15426432.2017.1385457>
- Gao, Z. (2017). A Reflection on China's Economic Reform from the Perspective of Catholic Social Teaching. *International Journal of Public Theology*, 11(4), 455–476. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341518>
- Glazier, R. A. (2018). Acting for God? Types and Motivations of Clergy Political Activity. *Politics and Religion*, 11(4), 760–797. <https://doi.org/10.1017/S1755048318000305>
- Gustafson, H. (2019). Pansacramentalism, Interreligious Theology, and Lived Religion. *Religions*, 10(7), 408. <https://doi.org/10.3390/rel10070408>
- Hof, E. (2020). Negotiating prophetic voice: Indonesian Protestant churches and state pressure. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(3), 401–423. <https://doi.org/10.1017/S0022463420000123>
- Hunsinger, G. (2017). *The Eucharist and Ecumenism: Let Us Keep the Feast*. Cambridge University Press.
- Kim, S. C. H., & Day, K. (2017). *A Companion to Public Theology*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004336063>
- Kleden, B. L. (2019). Teologi publik dan gereja lokal di Indonesia: Perspektif kontemporer. *Jurnal Teologi Indonesia*, 8(2), 77–98.
- Schliesser, C. (2023). Public theology as Christian witness: Beyond the binary. *Religions*, 14(4), 485. <https://doi.org/10.3390/rel14040485>
- Serrán-Pagán y Fuentes, C. (2021). Introduction to “Spanish Mysticism.” *Religions*, 12(9), 731. <https://doi.org/10.3390/rel12090731>
- Snyder, S. (2020). *The Protestant Ethic and the Spirit of Democracy: Religion and Politics in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- VanDrunen, D. (2020). *Politics After Christendom: Political Theology in a Fractured World*. Zondervan.
- Volf, M., & Croasmun, M. (2019). *For the Life of the World: Theology That Makes a Difference*. Brazos Press.